

**DUKUNGAN BAGI PERENCANAAN &
PEMANTAUAN STANDAR PELAYANAN
MINIMUM PENDIDIKAN DASAR
(ACDP - 018)**

LAPORAN AKHIR

15 Maret 2014

Disusun Oleh:

PT. TRANS INTRA ASIA (TIA), INDONESIA

Bekerjasama Dengan:

The Institute of Public Administration of Canada (IPAC), Canada

Untuk:

PROGRAM KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS DAN ANALISIS PENDIDIKAN

Program Kemitraan untuk Peningkatan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP):
Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Tel. +62 21 5785 1100, Fax: +62 21 5785 1101
Website: www.acdp-indonesia.org
Email Sekretariat: secretariat@acdp-indonesia.org

Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan BAPPENAS), Australian Agency for International Development (AusAID), Uni Eropa (EU) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah membentuk Program Kemitraan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) sebagai fasilitas untuk memajukan dialog kebijakan dan reformasi kelembagaan dan organisasi sektor pendidikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan membantu mengurangi kesenjangan dalam kinerja pendidikan di propinsi dan kabupaten di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (ESSP) yang terdiri dari (i) dukungan sektor anggaran Uni Eropa dengan pengaturan yang telah disetujui untuk pencairan hibah - didasarkan oleh hasil dan(ii) kebijakan dan program yang dialokasikan-oleh AusAID sektor pendukung hibah pengembangan yang terdiri dari: program prasarana sekolah, dan sebuah program pengembangan pengelolaan sekolah di kabupaten secara nasional serta sebuah program untuk mempercepat akreditasi madrasah swasta di Indonesia. Laporan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAID dan Uni Eropa melalui ACDP.



Institusi yang bertanggungjawab atas kajian ini adalah Trans Intra Asia

TIM KONSULTAN YANG MENYIAPKAN LAPORAN:

1. **Chris Majewski**, Ketua Tim (Ahli Kebijakan Pendidikan Dasar)
2. **Daniel Moulton**, Ahli Perencanaan Pendidikan Dasar dan Pengembangan Kapasitas
3. **Neneng Widiastuti**, Ahli Pendidikan Dasar Kabupaten dan Manajemen Sekolah
4. **Sandra Triatmoko**, Ahli Pendidikan Dasar dan Keuangan Kabupaten
5. **Robertus Soeharno**, Ahli Pendidikan Dasar dan Keuangan Kabupaten
6. **Budi Susetyo**, Ahli Pendidikan Dasar dan Keuangan Kabupaten
7. **I Made Sumertajaya**, Ahli Penelitian / Ketua Tim Survey
8. **Herena Pudjihastuti**, Ahli Statistik
9. **Julio Adisantoso**, Programmer Senior
10. **Anik Djuraidah**, Analis Data (1)
11. **Sigit Indarto**, Analis Data (2)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
ISTILAH DAN SINGKATAN.....	ii
1. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS.....	1
2. AKTIVITAS PROYEK.....	2
3. MOBILISASI DAN KOMPOSISI TIM.....	2
4. LAPORAN PENDAHULUAN.....	3
5. LAPORAN INTERIM.....	3
6. STRATEGI KONSULTASI.....	4
7. KEMAJUAN TERHADAP AKTIVITAS.....	4
Survey SPM-PD.....	4
Tinjauan kebijakan pendidikan di Tingkat Pusat dan Program yang berkaitan dengan SPM-PD.....	6
Tinjauan kapasitas Kabupaten dan pemantauan SPM-PD, dan.....	7
Rencana Tindak Lanjut Strategi Peningkatan Kapasitas dan Program SPM-PD.....	7
Membangun hubungan yang jelas antara SPM-PD dan sistem penjaminan pendidikan lainnya.....	9
Mengembangkan dan mendesain sistem untuk manajemen Program Hibah Kabupaten bagi pelaksanaan SPM-PD.....	11
Action plan for supporting nationwide achievement of basic education SPM-PD.....	13
8. DAFTAR LAPORAN YANG DIHASILKAN OLEH ACDP 018.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Kerangka Acuan Kerja ACDP 018

LAMPIRAN B. Organisasi dan Individu yang dikonsultasikan

ISTILAH DAN SINGKATAN

ISTILAH DAN SINGKATAN

ACDP	Kerjasama untuk Pengembangan Analisis dan Kapasitas	Analytical and Capacity Development Partnership
ADB	Asian Development Bank	Asian Development Bank
AusAID	Australian Agency for International Development	Australian Agency for International Development
BALITBANG	Research and Development Board	Research and Development Board
BAN-SM	Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah	National Board for Accreditation of Schools and Madrasahs
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	National Development Planning Agency
BEC-TF	Basic Education Capacity Trust Fund	
BE-MSS	Basic Education Minimum Service Standards	Basic Education Minimum Service Standards
BEMSS-CDP	Basic Education Minimum Service Standards Capacity Development Program	Basic Education Minimum Service Standards Capacity Development Program
BPSDMPK-PSM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penjaminan Mutu	Board of Human Resource Development of Education and Culture, Centre for Quality Assurance
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan	National Education Standards Board
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	School Operational Funding
DAK	Dana Alokasi Khusus	Special Allocation Funds
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan	Key Education Data
EMIS	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Education Management Information System
EQAS	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	Education Quality Assurance System
EU	Uni Eropa	European Union
FBE	Pendidikan Dasar Bebas Pungutan	Free Basic Education
FGD	Kelompok Diskusi Terfokus	Focus Group Discussion
Lakip	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Government Agency Performance Accountability Report
MI	Madrasah Ibtidaiyah	Elementary madrasah
MoHA	Kementerian Dalam Negeri	Ministry of Home Affairs
MoE	Kementerian Lingkungan Hidup	Ministry of Environment
MoEC	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ministry of Education and Culture
MoNE	Kementerian Pendidikan Nasional	Ministry of National Education Now referred to as MoEC
MoRA	Kementerian Agama	Ministry of Religious Affairs
NES	Standar Nasional Pendidikan	National Education Standard
PMPP	Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan	Educational Quality Assurance Centre
MOU	Nota Kesepahaman	Memorandum of Understanding
Renja	Rencana Kerja	Annual Plan
RPJPN	Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional	National Long-term Development Plans
RPJMN	Rencana Pengembangan Jangka	National Medium-term Development

	Menengah Nasional	Plans
RENSTRA	Rencana Strategis	Strategic Plan
SD	Sekolah Dasar	Primary School
SMP	Sekolah Menengah Pertama	Junior Secondary School
Susenas	Survey Sosial Ekonomi Nasional	National Economic and Social Survey
SSE	Penilaian Diri Sekolah	School Self Evaluation
USAID	Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pembangunan Internasional	United States Agency for International Development

TEKS UTAMA

1. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS

Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari proyek ini secara khusus diarahkan kepada tujuan, sasaran dan keluaran yang diinginkan sebagai berikut.

Pengembangan tujuan untuk mendukung Perencanaan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-PD)/ Basic Education Minimum Service Standards (BE-MSS) adalah untuk berkontribusi kepada pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang dalam pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi melalui strategi dukungan dan sistem untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar secara nasional.

Tujuan dari Dukungan bagi Perencanaan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar adalah untuk memperkuat dan mempertahankan kapasitas untuk pelaksanaan, implementasi dan pengawasan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar pada semua tingkatan.

Hasil yang ingin dicapai adalah lebih kepada strategi yang lebih efektif, program, pendanaan, dan sistem yang berkontribusi kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar secara nasional.

KAK dari proyek ini disampaikan pada Lampiran 1.

Tim ACDP 018 diharapkan untuk bekerja sama dan selaras dengan sejumlah pemangku kepentingan utama. Para pemangku kepentingan utama dari proyek ini adalah:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktorat Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penjaminan Mutu (BSDMPK-PPM)
- BALITBANG, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktorat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja, Kementerian Dalam Negeri
- Badan Standar Nasional Pendidikan
- Badan Nasional untuk Akreditasi Sekolah dan Madrasah
- Australian Agency for International Development (AusAID)
- Delegasi Uni Eropa Delegation untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN
- Asian Development Bank (ADB)
- Kelompok Kerja Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Untuk memastikan kerjasama dengan lembaga terkait diatas, proyek ini juga bekerja sama dengan otoritas pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan masukan yang jelas berdasarkan pandangan institusi tersebut.

2. AKTIVITAS PROYEK

Proyek ini memiliki tujuh aktivitas khusus terkait upaya perencanaan dan pemantauan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Secara singkat adalah:

1. *Melakukan Survey terkait Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*
2. *Mengkaji ulang kebijakan tingkat pusat dan program yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*
3. *Mengkaji ulang kapasitas tingkat Kabupaten dalam perencanaan dan pemantauan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*
4. *Mengembangkan hubungan yang jelas antara Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan sistem penjaminan mutu pendidikan lainnya*
5. *Mengembangkan lebih jauh sistem dan program Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*
6. *Mengembangkan dan menyusun sistem manajemen program hibah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*
7. *Mengembangkan sebuah rencana aksi untuk mendukung pencapaian nasional Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.*

Pada pertengahan tahun 2013, ACDP diminta untuk membantu menghasilkan keluaran tambahan. Hal ini diawali dari permintaan dari Asisten Deputi BAPPENAS melalui penyediaan sebuah laporan untuk digunakan bagi persiapan Pemerintah menuju Rencana Strategis Jangka Menengah berikutnya. Laporan dari ACDP-018 ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi ruang lingkup yang akan disediakan oleh Pemerintah bagi para murid agar dapat belajar secara kondusif, termasuk dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar. Permintaan ini menambah jangka waktu kontrak ACDP-018 sebanyak satu bulan hingga ke akhir bulan November 2013. Laporan tambahan ini diberi judul Kualitas Lingkungan Belajar dari Pendidikan Dasar di Indonesia: sebuah Perspektif Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar.

3. MOBILISASI DAN KOMPOSISI TIM

Tim konsultan nasional dimobilisasi pada akhir Desember 2012 sesuai dengan jadwal, dengan pengecualian Ahli Pendidikan Dasar dan Keuangan Kabupaten. Pengisian posisi ini kemudian dinegosiasi ulang dan penggantiannya dimobilisasi pada bulan Februari 2013. Posisi tersebut kemudian diisi oleh tiga orang konsultan nasional yang berbagi bulan yang waktu alokasinya didasarkan kepada hasil konsultasi dengan Sekretariat ACDP. Konsultan ketiga kemudian terlibat secara khusus untuk menyelesaikan laporan Manual Administrasi Proyek yang akan digunakan oleh Masyarakat Eropa (UE) yang akan datang, yang didanai dari Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar - Program Peningkatan Kapasitas (BEMSS-CDP). Pemanfaatan tiga spesialis yang berbeda tersebut kemudian terbukti berjalan sangat efektif, dengan hasil yang sangat baik dalam pelaksanaan Kegiatan 3 dan 5, yang mana merupakan konsentrasi pekerjaan dan Kegiatan 6 yang dimulai oleh satu dari dua orang spesialis yang ditunjuk sedari awal. Dan kemudian diselesaikan oleh konsultan ketiga yang ditunjuk secara khusus untuk mengemban tugas tersebut.

Ketua Tim Internasional dimobilisasi pada awal Bulan January 2013.

4. LAPORAN PENDAHULUAN

Draf Laporan Pendahuluan diserahkan kepada Sekretariat ACDP pada tanggal 28 Januari 2013, dan setelah diterima dengan baik, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Workshop Draf Laporan Pendahuluan yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2013. Tingkat partisipasi dalam Workshop ini sangat tinggi, dengan jumlah representasi dari organisasi terkait yang sangat baik dan lancarnya pelaksanaan diskusi. Diskusi difokuskan terutama kepada Survey Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar, dengan pertimbangan yang lebih mendetail kepada kerangka pengambilan sampling dan metodologi survei. Tidak ada perubahan besar pada Draf Laporan Pendahuluan yang kemudian diminta sebagai hasil perbaikan langsung dari Workshop Draf Laporan Pendahuluan, meskipun terdapat perbaikan pada metodologi survei Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar yang merupakan bagian dari Laporan Pendahuluan (lihat keterangan Kegiatan 1, dibawah).

5. LAPORAN INTERIM

Draf Laporan Interim diserahkan oleh Tim Konsultan pada Bulan Mei 2013, sebagaimana disyaratkan oleh KAK. Draf tersebut termasuk lampiran-lampiran penting yang telah menunjukkan hasil kerja yang dilakukan sampai saat tersebut, yakni:

- Ulasan dari Kapasitas Tingkat Kabupaten dalam Perencanaan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar
- Laporan Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal
- Analisa hubungan antara Indikator Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar dengan Indikator yang digunakan oleh sistem untuk Akreditasi dan Madrasah Sekolah
- Analisa hubungan antara Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar dengan Data Base Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

Laporan Interim di lokakaryakan dengan para pemangku kepentingan utama termasuk pemangku kepentingan dari Uni Eropa dan Asian Development Bank (ADB), yang mendiskusikan secara rinci mengenai draf Pedoman Administrasi Proyek (PAP) yang akan diberikan untuk BEMSS-CDP. Kemudian disepakati bahwa Pedoman yang dihasilkan akan bersifat draft dan bukan pedoman akhir. Juga telah disepakati bahwa walaupun Tim ACDP 018 akan menyusun saran tentang instrumen yang akan digunakan dalam penentuan standar pencapaian apa bagi 110 kabupaten yang akan berpartisipasi dalam BEMSS-CDP, Tim ACDP 018 tidak diminta untuk memberikan masukan terkait upaya sosialisasi Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar di Kabupaten-kabupaten. Sosialisasi ini, akan dikelola oleh Perusahaan dengan spesialisasi kepada hubungan masyarakat, yang mana keahlian khusus ini tidak terdapat dalam pembentukan Tim konsultasi dari ACDP 018.

Selama jenjang penulisan Laporan Interim, tercatat bahwa Evaluasi MSS-CDP bagi Pendidikan Dasar belumlah selesai dan perlu dilanjutkan. Hal ini disetujui oleh Ketua Tim ACDP 018, yang menyarankan bahwa kelanjutan dari program ini sudah dimasukkan kepada rencana kedepan.

6. STRATEGI KONSULTASI

Dalam pelaksanaannya, proyek ini telah bekerjasama secara dekat dengan para pemangku kepentingan kunci. Hal ini dikarenakan fokus proyek yang merupakan penyiapan dokumen dan proses Program Peningkatan Kapasitas - Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar **sangat memerlukan keterlibatan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemenag, ADB, dan Delegasi Uni Eropa secara dekat.**

Konsultasi secara berkelanjutan juga telah diadakan dengan **organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap elemen-elemen kunci dari Sistem Penjaminan Kualitas Pendidikan (EQAS) di Indonesia**, khususnya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Penjaminan Kualitas Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konsultasi yang terkait dengan kebijakan dan peraturan BEMSS-CDP juga dilakukan dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

Mengingat hubungan erat antara ACDP 018 dan BEMSS-CDP, telah disepakati dan tercatat dalam Laporan Pendahuluan bahwa Badan Pengawas BEMSS-CDP juga akan memberikan pengawasan umum terhadap pelaksanaan proyek ACDP 018. Penundaan pelaksanaan BEBE-MSS-CDP berarti bahwa Badan Pengawas tersebut tidak mampu memenuhi fungsi ini ketika Tim ACDP 018 sudah beroperasi sehingga **pengawasan utama dari proyek ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.** Daftar lengkap organisasi dan individu yang dikonsultasikan disampaikan dalam Lampiran B, Organisasi dan Individu dikonsultasikan.

7. KEMAJUAN TERHADAP AKTIVITAS

Survey SPM-PD

Pelaksanaan Survey SPM-PD 2013 dilaksanakan untuk **memberikan informasi tentang pencapaian Indikator Kinerja SPM-PD dalam sebuah survey nasional kepada kabupaten/kota dan sekolah/madrasah sampel serta untuk mengukur kemajuan dengan membandingkannya terhadap Survey Baseline BE-MSS yang dilakukan pada tahun 2010.**

Kerangka sampling, metodologi dan jadwal survey disajikan dalam Laporan Pendahuluan dan dibahas pada Lokakarya Draf Laporan Pendahuluan. Meskipun pada saat Lokakarya terjadi beberapa perdebatan terkait metode sampling, dimana disarankan bahwa stratifikasi sekolah/madrasah dalam survei cukup dilakukan atas dasar hasil ujian nasional saja, namun usulan stratifikasi sampel yang lebih kompleks telah dapat diterima.

Pada diskusi selanjutnya dengan Sekretariat ACDP, ada permintaan untuk **mereview metodologi pekerjaan proyek untuk memastikan bahwa proses pengambilan sampel sudah cukup kuat** untuk dapat digunakan sebagai model untuk penelitian di masa mendatang yang akan dilakukan di bawah naungan ACDP. Dalam hal ini, ahli

statistik dari ACDP 018 akan dilibatkan oleh Sekretariat ACDP untuk memberikan alih pengetahuan kepada dengan ahli statistik yang akan dimobilisasi oleh proyek. Dengan adanya diskusi yang konstruktif dan meskipun Sekretariat ACDP menunda pelaksanaan survei, hasilnya terbukti sangat produktif, menghasilkan dokumentasi yang sangat rinci dan metodologi yang transparan. Metodologi survei selengkapnya disampaikan pada Lampiran A.

Sampel survey SPM-MSS Tahun 2013 terdiri dari 5.280 sekolah dasar/madrasah (SD/MI) dan SMP sekolah/madrasah (SMP/MTs) di 104 kabupaten/kota. Sebanyak 23 kabupaten/kota merupakan bagian dari Baseline Survey Tahun 2010. Sejumlah 20% sekolah/madrasah sudah cukup dengan kedua survei tersebut untuk memungkinkan dilakukannya pengukuran perubahan selama tiga tahun. Survei ini meliputi enam daerah di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara dan Maluku dan Papua. Sampel juga disusun untuk meliputi kepada tiga tingkat kemajuan sosio-ekonomi dari seluruh kabupaten/kota: berkembang, sedang berkembang dan kurang berkembang. Sekolah/madrasah kemudian dikelompokkan kepada delapan strata, yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta dan madrasah, dan pemerintah dan sekolah menengah pertama dan madrasah. Sekolah-sekolah/madrasah dipilih secara acak, dengan menggunakan desain pemilihan sampel yang memastikan bahwa sampel-sampel tersebut merupakan wakil dari sistem pendidikan dasar formal di Indonesia.

Survei ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 34 supervisor dan 446 surveyor pada bulan Juni 2013. Survei ini dilakukan dengan waktu yang sempit karena pada sebagian besar kabupaten Tahun Ajaran akan selesai pada tanggal 15 Juni dan meskipun adalah hal yang umum bagi Kepala Sekolah atau setidaknya beberapa guru masih berada di sekolah selama beberapa hari setelah tanggal tersebut, namun hal tersebut tidak dijamin. Sebanyak 5.285 sekolah/madrasah telah berhasil disurvei meskipun terdapat banyak kesulitan pada beberapa kasus. Dalam hal ini beberapa sekolah/madrasah sampel berlokasi sangat jauh dan membutuhkan waktu tempuh yang banyak. Kemudian tidak semua Pemerintah kabupaten/kota memperpanjang kerja sama dengan pengawas survei yang mengalami kesulitan yang signifikan dalam memperoleh informasi dan dokumentasi yang diperlukan dari otoritas pendidikan setempat. Selain itu, terdapat kasus penipuan yang mengatas namakan wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan uang, yang kemudian hal ini berdampak negatif terhadap tugas para pengawas survei. Salah satu dari penipu tersebut bahkan ditangkap dan ditahan hingga selesai diklarifikasi.

Dalam beberapa kasus, pengawas menemukan bahwa ada surveyor-surveyor yang mengajukan kuesioner yang tidak lengkap, sehingga diperlukan upaya untuk melengkapi sehingga dapat dipastikan bahwa data set yang tersedia akan cukup untuk dianalisis. Beberapa upaya ini dilakukan dengan mengulangi kunjungan ke sekolah/madrasah tetapi lebih sering upaya tindak lanjut dilakukan hanya melalui telepon. *Quality control* yang meliputi kepada pemeriksaan di lapangan dan proses verifikasi yang melibatkan 558 kepala sekolah/madrasah menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesulitan-kesulitan, hasil survei dinilai telah berlangsung dengan integritas yang cukup untuk memberikan hasil yang baik dan analisis selanjutnya dapat berlangsung dengan tingkat kepercayaan yang baik.

Entri data dan pembersihan data dilakukan pada paruh kedua bulan Juli dan Agustus, sedangkan proses analisis dimulai pada akhir Bulan Agustus. Konsultasi dilakukan dengan para pemangku kepentingan kunci pada pertengahan September dan draft laporan survei diselesaikan pada awal November. **Analisis disampaikan dalam laporan hasil survei dengan berfokus pada hasil perbedaan dalam pencapaian SPM-PD** oleh enam daerah dari Indonesia, delapan strata penyedia pendidikan dasar, tingkat akreditasi sekolah/madrasah, tingkat kemajuan sosial ekonomi kabupaten/kota yang disurvei dan kinerja sekolah/madrasah 'pada saat ujian nasional. Dilakukan juga analisis pencapaian BE-MSS pada 20% sekolah/madrasah yang terdapat pada kedua survey di Tahun 2010 dan 2013 sehingga dapat ditunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu.

Laporan survei menghitung **kesenjangan antara situasi saat ini dan dimana semua institusi penyedia Pendidikan Dasar mencapai BE-MSS** dalam hal anggaran dan memberikan analisis terkait Indikator Kinerja BE-MSS saat ini, sehingga dapat disusun saran untuk melakukan perbaikan. Laporan ini merekomendasikan tinjauan utama pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Indonesia bagi pendidikan dasar untuk meningkatkan koherensi dan keselarasan sistem pendidikan dimana **SPM-PD** merupakan salah satu bagiannya.

Laporan pelaksanaan survey ini disusun sebagai *Laporan Survey Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar Tahun 2013*.

Tinjauan kebijakan pendidikan di Tingkat Pusat dan Program yang berkaitan dengan SPM-PD

Kerangka Acuan Kerja dari ACDP 018 terdiri dari keluaran sebagai berikut:

Tinjauan Kebijakan Pendidikan Tingkat Pusat dan Program-program yang berkaitan dengan SPM-PD.

Pekerjaan ini pada dasarnya **ditujukan hanya sebagai desk review**, bekerjasama dengan beberapa Direktorat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang merupakan sumber bagi dokumentasi dan informasi yang relevan.

Tujuan dari Laporan ini adalah untuk **menguji kebijakan Pemerintah Pusat, peraturan dan aliran anggaran** yang berhubungan dengan pembentukan, pengelolaan dan pendanaan Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar (SPM-PD). Badan-badan utama yang terlibat meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Makalah ini meneliti dasar legislatif SPM-PD, peran dan fungsi saat ini daripada para pemangku kepentingan kunci yang relevan dengan pelaksanaan program dan aliran dana dari Pemerintah Pusat yang dimaksudkan untuk mendukung pencapaian nasional SPM-PD.

Selain menganalisa situasi nasional, laporan ini juga meneliti situasi dalam **konteks internasional**. Sejumlah negara lain telah menetapkan standar yang sebanding untuk menyampaikan pendidikan dasar, meskipun hanya Vietnam yang menggunakan sistem yang sangat mirip Indonesia. Dalam kaitannya memiliki standar nasional dan standar pelayanan minimum yang disebut Kualitas Fundamental Tingkat Sekolah. **Perbandingan dibuat berdasarkan sistem internasional dengan SPM-PD.**

Makalah ini meneliti dasar legislatif dari tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan SPM-PD, dengan memberikan diagram yang merepresentasikan **dua sistem pemantauan dan pelaporan utama**: Sistem Pelaporan SPM-PD dan Sistem LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Makalah ini juga mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana berdasarkan dua sistem pemantauan dan pelaporan tersebut. Tidak adanya sanksi yang efektif bagi para pemerintah daerah yang saat ini tidak memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pencapaian SPM-PD juga dicatat.

Pendanaan bagi pelaksanaan SPM-PD juga dikaji, dengan tujuan untuk menggambarkan perbedaan pendidikan dasar oleh pemerintah dengan swasta dan mencatat perangkat pendanaan dari pemerintah terkait dengan perangkat pengajar dan anggaran bagi sekolah swasta/madrasah. Aliran dana utama dari **Pemerintah Pusat yang dapat digunakan untuk mempromosikan pencapaian SPM-PD nasional** diidentifikasi dan dianalisis dalam sebagai referensi mereka untuk fokus kepada SPM-PD. Mata anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Peningkatan Mutu dan Program peningkatan Akses.

Kontribusi anggaran untuk pendidikan dasar oleh Provinsi dan Kabupaten/kota juga dianalisis sebagai kewajiban bagi **Pemerintah Daerah untuk menyediakan setidaknya 20%** dari anggaran mereka untuk pendidikan.

Makalah yang meliputi keluaran tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat ACDP dengan judul Review Kebijakan Pendidikan dan Program Tingkat Pusat Terkait SPM-PD.

Tinjauan kapasitas Kabupaten dan pemantauan SPM-PD, dan

Rencana Tindak Lanjut Strategi Peningkatan Kapasitas dan Program SPM-PD

Kedua keluaran diatas sangat erat kaitannya dan telah diserahkan ke Sekretariat sebagai salah satu makalah, berjudul Ulasan Kapasitas Kabupaten / Kota dalam Perencanaan dan Monitoring Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Strategi Peningkatan Kapasitas Program untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar.

Tujuan utama dari keluaran ini adalah untuk memberikan informasi untuk kegiatan di masa depan dalam meningkatkan kapasitas sistem untuk melaksanakan SPM-PD. Program Pengembangan lanjutan dari Peningkatan Kapasitas Program Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar (BEMSS-CDP) yang didanai melalui hibah dari Uni Eropa dan dikelola oleh ADB ini merupakan tujuan utama dari rekomendasi yang akan dikeluarkan.

Pendekatan yang digunakan termasuk kepada:

- Diskusi dengan pemangku kepentingan kunci tingkat nasional, menggambarkan persepsi mereka akan kekuatan dan kelemahan dari program peningkatan kapasitas SPM-PD sebelumnya;
- Sebuah survey yang terdiri dari wawancara dan FGD di lima Provinsi, dan
- Studi literatur dari dua set dokumen:
 - Yang dikumpulkan dari lapangan yang menjadi bagian dari wilayah survey, dan
 - Kajian dan evaluasi dari program peningkatan kapasitas SPM-PD sebelumnya.

Sembilan kabupaten yang termasuk dalam survei terdiri dari lima kabupaten percontohan SPM-PD sebagaimana diamanatkan oleh ToR pekerjaan dan empat kabupaten tetangga non-pilot sebagai perbandingan. Empat konsultan ACDP 018 dan sembilan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama terlibat dalam survei. Instrumen survei yang diujicobakan di Jawa Barat selama seminggu dimulai dengan 28 Januari 2013. Kunjungan awal untuk semua sembilan kabupaten dilakukan untuk memperjelas tujuan dari konsultasi dengan pemerintah daerah dan untuk meminta keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dalam pekerjaan ini. Survey lapangan memperoleh kerjasama yang sangat baik dari semua otoritas pendidikan lokal di setiap lokasi tersebut.

Survei ini dilakukan antara 22 April dan 10 Mei 2013. Wawancara diadakan dengan para pejabat provinsi dan kabupaten serta dengan kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah di 32 sekolah/madrasah. Peserta FGD termasuk pejabat dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, Kantor Dinas Agama dan Bappeda setempat, beberapa anggota DPRD dan kepala sekolah dan madrasah. Rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang menjadi anggota tim survey lapangan telah mengambil bagian secara aktif dalam semua kegiatan survey, hadir di masing-masing FGD, memberikan wawasan yang berharga dan berkontribusi pada laporan akhir.

Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi SPM-PD dikumpulkan pada setiap tingkat Provinsi, Kabupaten dan Sekolah/Madrasah. Contoh dari data kuantitatif yang dikumpulkan selama survey adalah:

- Rencana Jangka Menengah Sekolah/Madrasah dan Rencana Tahunan dan Anggaran (RKS dan RKT/RKAS); Rencana Jangka Menengah Provinsi dan Kabupaten (Renstra dan RPJMD)
- Rencana Tahunan (Renja); dan
- LAKIP

Seluruh dokumen ini dianalisis untuk menilai implementasi SPM-PD, menghasilkan pandangan yang mendalam kepada pemahaman Pemerintah dan Sekolah/Madrasah dan juga komitmen kepada perencanaan dan pencapaian SPM-PD kedepan.

Evaluasi terhadap lima proyek (dan dua pendahulu proyek) terkait kepada perencanaan dan evaluasi SPM-PD telah dilakukan. Proyek yang di evaluasi adalah:

- *Basic Education-Sector Capacity Support Program (BE-SCSP) Component 1: Central Provincial, and District Capacity Development for Decentralization* (dibiayai oleh Uni Eropa—2005-2010);
- *Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF)* (kerjasama antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Bank Dunia, dengan pendanaan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda dan Komisi Eropa - 2008-2012);
- *School Systems and Quality (SSQ)* (hibah yang dibiayai melalui Kerjasama AusAID untuk Pendidikan - 2011 - 2016) dan juga projek lanjutannya
- *Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP)* --2006 -2010);
- *Prioritizing Reform, Innovation and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students (PRIORITAS)* (hibah dari USAID—2012-2017) dan juga projek lanjutannya
- *Decentralizing Basic Education (DBE)* --2005 – 2011; dan
- *Better Approaches to Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi (BASICS)* (hibah dari CIDA -- 2008 – 2014).

Laporan dan dokumen dari proyek diatas telah dievaluasi untuk dapat mempercepat pengenalan awal kepada proyek ini dengan cepat. Sumberdaya manusia yang dapat dipanggil untuk berbagi pengalaman berharga bagi tim BEMSS-CDP yang baru juga diidentifikasi. Sumberdaya tersebut dapat sangat berguna untuk perusahaan pelaksana sosialisasi *public relations* yang akan dikontrak untuk melakukan sosialisasi dan kampanye berbasis media untuk promosi program BEMSS-CDP.

Hasil dari evaluasi telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa program sosialisasi besar-besaran yang digunakan untuk membangun pengenalan terhadap SPM-PD sejak tahun 2010 hasilnya masih cukup mengecewakan. Pengetahuan tentang SPM-PD kepada seluruh sistem pendidikan dasar masih sangat rendah, dan masih terdapat kebingungan dalam membedakan standar umum dengan delapan standar Standar Nasional Pendidikan. ACDP 018 mengidentifikasi bahwa sistem pengumpulan dan analisis data SPM-PD justru merupakan inti dari masalah saat ini dengan adanya perubahan standar pencapaian nasional, dan ACDP 018 memberikan nasihat rinci tentang alat dan proses yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Dalam keselarasan dengan pemberian saran ini, ACDP 018 memberikan saran untuk mengulang sosialisasi kepada komunitas pendidikan dasar, dengan alasan bahwa program tersebut, khususnya dalam program pelatihan, sudah tidak mungkin memiliki efek yang diinginkan. Penekanan diperlukan pada penyediaan dan mendukung basis data elektronik yang *user-friendly* yang dapat membantu pendidik yang tidak ahli dalam mengelola perangkat lunak untuk melakukan analisis data untuk memberikan analisis yang relevan dengan perencanaan dalam pencapaian SPM-PD pada setiap tingkat sistem termasuk sekolah / madrasah .

Membangun hubungan yang jelas antara SPM-PD dan sistem penjaminan pendidikan lainnya

Tujuan dari keluaran ini adalah untuk menganalisis **hubungan antara Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar (SPM-PD) dan elemen-elemen lain dari**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (EQAS) yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan dasar di Indonesia.

KAK ACDP 018 menyatakan hal-hal berikut ini:

Mengembangkan hubungan yang jelas antara Standar Pelayanan Minimum bagi Pendidikan Dasar dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan lainnya. Menganalisa dan mengartikulasikan hubungan antara MSS dan sistem akreditasi sekolah / madrasah (di bawah Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah / Madrasah, [BAN-SM]) untuk memfasilitasi kejelasan dan konsistensi bagaimana dua sistem dapat selaras dan diinterpretasikan untuk tujuan penilaian. Merekomendasikan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengembangkan pedoman / instrumen yang diperlukan.

Selain SPM-PD, sistem pendidikan dasar di Indonesia memiliki tiga proses lain yang menjadi bagian utama dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal serta dapat memberikan penilaian mutu agregat sekolah / madrasah. Ini adalah:

- Akreditasi;
- Standar Sekolah Nasional; dan
- Evaluasi Diri Sekolah.

Data set dan informasi lain yang relevan juga ditemukan untuk menjadi bahan diskusi, meskipun secara agregat tidak memberikan penilaian terhadap kualitas pendidikan seperti proses di atas. Set data dan informasi ini termasuk set data yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama melalui sensus sekolah/madrasah masing-masing (DAPODIK dan EMIS), hasil ujian nasional pada kelas tahun 6 dan 9, data dari pengawas sekolah/madrasah, dan data set yang berhubungan dengan kualifikasi guru dan sertifikasi. Meskipun hasil evaluasi dan diskusi terkait data set dan informasi tambahan ini termasuk dalam lingkup pekerjaan, data set yang ditemukan tidak banyak pengaruh dalam sistem EQAS dan lebih sebagai tambahan saja. Data set ini tidak menciptakan penilaian agregat bagi kualitas pendidikan, tapi hanya memberikan bagian tambahan data dan informasi bagi sistem penilaian agregat tersebut.

SPM-PD, Akreditasi, Standar Sekolah Nasional (SSN) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) semua dirumuskan berdasarkan Standar Pendidikan Nasional (SPN) yang memiliki sekitar 700 indikator yang diatur dalam delapan kategori. Namun tak satu pun dari keempatnya, menggunakan semua indikator SPN yang sebenarnya merupakan sebuah aspirasi daripada sebuah kerangka peraturan. Sangat sedikit penyedia pendidikan dasar di Indonesia, termasuk yang Terakreditasi A yang merupakan tingkat tertinggi akreditasi, dapat memenuhi semua indikator SPN relevan dengan tingkat penyelenggaraan pendidikan (misalnya tingkat pendidikan dasar).

Tim ACDP 018 bertemu dan melakukan diskusi dengan semua lembaga utama yang terlibat dalam EQAS untuk pendidikan dasar: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Madrasah

Kementerian Agama, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP).

Saat ini, hubungan antara unsur-unsur dari sistem jaminan mutu pendidikan tidak didefinisikan dengan baik, dan ada beberapa kebingungan di lapangan tentang hubungan antara mereka. ACDP 018 mengeksplorasi hubungan tersebut dengan sangat rinci, menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam filosofi dasar mereka terkait apa yang disebut sebagai kualitas pendidikan. Analisis juga dilakukan, secara mendalam, bagaimana berbagai bagian dari EQAS mengoperasikan instrumen mereka dan juga pelaksanaan proses pengumpulan data, sekali lagi mencatat perbedaan dan persamaan. Sebagai contoh, perbandingan antara SPM-PD termasuk bukan hanya perbandingan kerangka kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan. Hal ini termasuk pencocokan secara rinci dari masing-masing indikator dan sub-indikator kinerja BE-MSS yang setara pada instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi, termasuk pada tingkat pedoman teknis.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam pendekatan di berbagai bagian EQAS pendidikan dasar menyebabkan kesulitan terjadi tidak hanya di tingkat sekolah / madrasah, tetapi juga secara sistemik. Rekomendasi kemudian disusun akan perlunya kajian komprehensif dari sistem tersebut, yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal tersebut diakui bahwa review harus melibatkan pemeriksaan terhadap semua indikator-indikator di semua bagian dari EQAS, yaitu: SPM-PD, Akreditasi, Standar Sekolah Nasional, dan Evaluasi Diri Sekolah. Hal ini diakui bahwa ini akan menjadi usaha yang sangat besar, yang melibatkan beberapa Direktorat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dan badan-badan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan.

Makalah ACDP 018 yang secara langsung menganalisis masalah di atas adalah *Analisis Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bagi Pendidikan Dasar di Indonesia*.

Mengembangkan dan mendesain sistem untuk manajemen Program Hibah Kabupaten bagi pelaksanaan SPM-PD

Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar (BEMSS-CDP) adalah program besar yang didanai oleh Uni Eropa yang dirancang untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam tujuannya untuk memastikan bahwa semua penyedia pendidikan dasar yang sifatnya formal di negara tersebut akan beroperasi dengan standar kualitas minimal yang ditentukan oleh SPM-PD, atau beroperasi di atas standar tersebut. Proyek ini akan bekerja dengan 110 kabupaten / kota yang dianggap membutuhkan bantuan untuk kemajuan pencapaian SPM-PD di bidang tanggung jawab mereka tersebut.

Kegiatan utama direncanakan akan dilaksanakan di yang awal pada 110 kabupaten BE-MSS-CDP meliputi:

- (i) penentuan status quo dalam prestasi SPM-PD di kabupaten sasaran dan analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan pencapaian SPM-PD secara penuh;

- (ii) kajian pengembangan kapasitas agar kabupaten dan sekolah/madrasah dapat mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data yang diperlukan untuk upaya perencanaan;
- (iii) identifikasi pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan bagi para pengguna data pada kedua tingkat sekolah/madrasah dan kabupaten, dan
- (iv) identifikasi target sosialisasi dan jenis dokumen yang dibutuhkan untuk menghasilkan dukungan untuk SPM-PD pada berbagai instansi pemerintah di level eksekutif, legislatif lokal, masyarakat sipil dan media.

ACDP 018 ditugaskan untuk membuat draft Administrasi Manual Proyek (PAM) untuk program dan untuk memberikan saran tentang bagaimana cara menciptakan dasar dari pencapaian SPM-PD di kabupaten/kota sasaran.

BE-MSS - CDP dimaksudkan untuk dimulai pada pertengahan 2013, tetapi fase operasional ini telah dijadwalkan akan dimulai pada 2014. Penundaan ini dalam dimulainya pekerjaan ini memberikan pihak pemberi pekerjaan kesempatan untuk meminta Tim ACDP menyusun PAM versi akhir daripada sekedar versi draft. Tim ACDP 018 menerima permintaan tersebut dan mampu menyusun produk yang diminta dengan menggunakan sisa dana kontingensi untuk mendanai waktu kerja ekstra bagi Ahli Pendidikan Dasar Pemerintahan Kabupaten dan juga Ahli Keuangan. Draft tersebut kemudian telah melalui sejumlah iterasi dan terakhir beberapa kali dikaji oleh pemangku kepentingan dari ADB, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perwakilan Kementerian Agama. Sebagai sebuah pekerjaan hampir selesai, dua lokakarya konsultasi kemudian diatur, satu lokakarya dengan Kementerian Dalam Negeri dan yang lainnya dengan Kementerian Keuangan. Rancangan ini kemudian diuji lebih lanjut di lapangan pada dua wilayah, salah satunya telah menjadi bagian dari proyek BEC - TF dan lainnya tidak punya kegiatan SPM-PD yang intensif. Dokumen tersebut kemudian jadi, dengan judul Pedoman Administrasi Proyek, Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal bagi Pendidikan Dasar kemudian diserahkan menjelang akhir September 2013 kepada ADB yang akan mengelola BEMSS - CDP atas nama Uni Eropa.

Bagian lain pekerjaan ACDP 018 yang dirancang untuk mendukung proyek Uni Eropa adalah **rekomendasi tentang cara mengukur dasar pencapaian SPM-PD di kabupaten sasaran**, dan bagaimana kemudian mengukur proses tersebut dari waktu ke waktu. Tidak ada instrumen atau proses yang dimandatkan untuk pengukuran SPM-PD di kabupaten / kota, meskipun beberapa versi instrumen yang tersedia dari waktu pengenalan SPM-PD pada tahun 2010, termasuk instrumen yang digunakan dalam Survey Dasar SPM-PD Tahun 2010. Pedoman Teknis SPM-PD diwujudkan melalui Peraturan Menteri 23/2013 yang memberikan petunjuk rinci tentang cara untuk mengukur kepatuhan dengan masing-masing Indikator Kinerja dan sub-indikator SPM-PD, tetapi mereka tidak menentukan instrumen yang akan digunakan.

ACDP 018 melakukan analisis hubungan antara Indikator Kinerja SPM-PD dengan basis data pendidikan yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggantikan Padati Web, sebagai basis data sebelumnya. Data base baru ini, bernama Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan cepat mengumpulkan data sekolah, dan dikabarkan sudah mencakup lebih dari 90% sekolah

pendidikan dasar, baik sekolah negeri maupun swasta. Analisis rinci dari item data dan BE-MSS menunjukkan bahwa **lebih dari sepertiga dari SPM-PD dapat diekstraksi dari DAPODIK**, terutama barang-barang yang berkaitan dengan infrastruktur dan tenaga kerja.

Tim ACDP 018 menyadari bahwa proyek bantuan lain, seperti Prioritas (proyek yang didanai AS), bekerja pada pengembangan perangkat lunak yang dapat berinteraksi dengan data base DAPODIK untuk mengekstrak informasi dalam format yang dapat menghasilkan laporan berdasarkan beberapa Indikator Kinerja SPM-PD. Perangkat lunak ini dilakukan pada tingkat kabupaten/kota daripada tingkat pusat. Pertemuan antara ACDP 018 dan Prioritas menunjukkan bahwa perangkat lunak mereka sudah bisa mengekstrak sebagian besar data Indikator Kinerja SPM-PD yang berkaitan dengan kepegawaian sekolah, dan Prioritas bersedia untuk lebih mengembangkan software mereka untuk mengekstrak informasi yang berkaitan dengan infrastruktur. ACDP 018 kemudian mengatur agar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk menyelenggarakan lokakarya yang dihadiri oleh jajaran petugas mereka sendiri, Tim ACDP 018, Kementerian Agama, petugas pengelola DAPODIK dan personil ADB. Lokakarya ini menghasilkan **kesepakatan bagi Prioritas untuk bekerja sama dengan DAPODIK dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar**. Juga untuk memiliki paket perangkat lunak yang dapat digunakan, termasuk untuk menjadi bagian dari BEMSS - CDP. Pemahaman saat ini adalah bahwa 110 BEMSS-CDP kabupaten akan memanfaatkan perangkat lunak Prioritas untuk mengukur pencapaian SPM-PD di daerah mereka. Karena DAPODIK tidak dapat memberikan informasi pada semua SPM-PD, terutama yang berkaitan dengan proses pendidikan, instrumen dan proses lainnya harus melengkapi dengan pengumpulan data. Makalah ACDP 018, Usulan Proses untuk Mengukur Status Dasar dari 110 Kabupaten / Kota yang menjadi Target dari Program Peningkatan Kapasitas Minimum bagi Pendidikan Dasar, memberikan deskripsi lengkap akan instrumen dan proses yang akan direkomendasikan.

Action plan for supporting nationwide achievement of basic education SPM-PD

Sebuah kesimpulan penting yang dihasilkan dari Survey SPM-PD, yang didukung oleh bukti-bukti berupa surat-surat penting lainnya dari proyek ini, adalah bahwa **pelaksanaan SPM-PD di Indonesia akan terus terhambat oleh inkonsistensi antara unsur-unsur kunci dari EQAS dan dengan kesulitan yang berhubungan dengan beberapa indikator kinerja SPM-PD yang terlalu ambisius**. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat peran penting dan sentral yang dimainkan oleh **SPM-PD** dalam memfokuskan perhatian semua tingkat sistem pendidikan dasar, dari sekolah / madrasah, melalui otoritas pendidikan lokal, sampai ke tingkat nasional, untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan setidaknya dapat diterima.

Inkonsistensi antara sistem SPM-PD dengan sistem Akreditasi terlihat sangat memprihatinkan, namun masalah tersebut berlaku secara umum untuk hubungan antara semua bagian dari sistem EQAS. Sistem Akreditasi jauh lebih dikenal dan menikmati status yang lebih tinggi dalam komunitas pendidikan daripada SPM-PD. Survei SPM-PD Tahun 2013 menunjukkan bahwa banyak sekolah/madrasah terakreditasi A, tingkat tertinggi akreditasi, pada kenyataannya tidak sesuai dengan

beberapa indikator kinerja SPM-PD yang tampaknya ditetapkan pada tingkat yang lebih aspiratif daripada realistis dalam konteks di Indonesia. Situasi ini harus ditangani sebagai langkah pertama dalam merancang sebuah rencana aksi menuju pencapaian penuh dari SPM-PD, dan sebaiknya juga dibahas dalam konteks **tinjauan EQAS yang lebih luas**. Tinjauan tersebut membutuhkan **usaha yang sangat besar, dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan**. Hasil dari kajian tersebut akan membutuhkan revisi peraturan pada semua bagian EQAS termasuk SPM-PD, yang juga merupakan proses yang akan memakan waktu. Di antara tugas-tugas diidentifikasi dalam hal ini diusulkan sebuah proses amandemen untuk dapat lebih memfokuskan kepada pemanfaatan beberapa mata anggaran di Pemerintah Pusat untuk percepatan kemajuan pencapaian SPM-PD. Diperkirakan untuk mencapai titik ini akan memakan waktu hingga dua tahun, dan selama proses ini berjalan, kegiatan SPM-PD juga harus terus berjalan.

Jadwal dan rincian pendekatan yang diusulkan dalam perencanaan pencapaian sistemik SPM-PD akan disediakan pada Bab 15, *Rencana Aksi untuk Mendukung Pencapaian skala Nasional SPM-PD disajikan di makalah ACDP 018, Laporan pelaksanaan Survei Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar pada tahun 2013*.

8. DAFTAR LAPORAN YANG DIHASILKAN OLEH ACDP 018

Laporan Survey Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Tahun 2013

Ulasan Kebijakan dan Program Pendidikan Terkait SPM-PD Tingkat Pusat.

Ulasan Kapasitas Kabupaten/Kota dalam Perencanaan dan Monitoring Layanan Standar Pelayanan Minimum bagi Pendidikan Dasar dan Strategi dalam Pengembangan ke Depan Program Peningkatan Kapasitas untuk Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Analisis Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Pendidikan Dasar di Indonesia

Proyek Administrasi Manual, Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Usulan Proses untuk Mengukur Status Dasar dari 110 Kabupaten / Kota Target oleh Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Rencana Aksi untuk Mendukung Pencapaian Skala Nasional SPM-PD, disajikan sebagai Bab 15 pada Laporan Standar Pelayanan Minimal Survei Pendidikan Dasar tahun 2013

LAMPIRAN 1

KERANGKA ACUAN KERJA ACDP 018

**Kerangka Acuan Kerja– ACDP 018
(Rebid)**

Topic: **Support to Basic Education Minimum Service Standards Planning and Monitoring**

Source of Support: **The Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Method of Selection: IDC – QCBS**

Duration of Assignment: **9 Months**

Estimated Total Cost: **USD 1,482,695**

Implementing Partners: **Ministry of Education and Culture (MoEC), Ministry of Religious Affairs (MoRA), Ministry of National Development Planning (*Bappenas*)**

Contracting Organization: **Asian Development Bank**

I. Development Objective(s)

1. The development objectives of the support to Basic Education Minimum Service Standards (BE-MSS) Planning and Monitoring are to contribute towards achieving medium to long term social and economic national development goals through supporting strategies and systems for nationwide achievement of BE-MSS.

II. Strategic Background

2. The Minimum Service Standards for Basic Education are set in the context of the National Standards of Education (NSE). The NSE, introduced in 2005, establish the foundation and criteria for planning, resourcing, managing, implementing, supervising, monitoring and evaluating education. The achievement of the NSE will improve the quality of education and educational outcomes. The NSE stipulates eight clusters of standards: (a) standards on education contents; (b) standards on education processes; (c) standards on competence of graduates; (d) standards on teachers and other education personnel; (e) standards on infrastructures and equipments; (f) standards on education management; (g) standards on education funding; and (h) standards on education evaluation. Overall, the NSE includes a mix of input, process, method, and output/outcome indicators to describe a minimum acceptable level for the national education system.

3. Achievement of the NSE is very variable across education units, education providers, and organisations responsible for managing education and in general it is recognised that the large majority of schools and madrasahs are performing at levels

considerably below the NSE. Within this context the BE-MSS establish minimum standards through the identification of indicator targets, related to key NSE, as a step towards fully achieving NSE. It is envisaged that continual improvement will be made from achieving the BE-MSS to achieving the NES and to achieving standards above the NSE¹.

4. Development and implementation of Minimum Service Standards is an important Government strategy to improve service delivery in Indonesia. The MOEC Strategic Plan (*Renstra*) 2010-14 sets targets for 100% of primary schools and 75% of junior secondary schools achieving BE-MSS by 2014. The Minimum Service Standards for Basic Education was formalised through the signing of a MoEC Ministerial Regulation (15/2010) in July 2010. BE-MSS recognizes the need to improve efficiency in the distribution and utilization of resources in the education sector. BE-MSS is fundamentally pro-poor in that it focuses on ensuring that schools meet minimum standards, i.e. it supports improvement strategies and resource allocation for those schools and madrasahs that are less well developed and resourced.

5. Minimum Service Standards incorporates 27 indicators grouped into two clusters focused on services under the responsibility of the district/city government, and services under the responsibility of the school/madrasah. The indicators were developed to facilitate analysis, planning and resource allocation at the district/city and school/madrasah focused on key inputs and processes that can improve education performance in an optimal manner. BE-MSS is an integral part of the Education Quality Assurance System (EQAS), established by a MoEC regulation in 2009, to reinforce and guide systematic management of education quality. Establishing effective monitoring and reporting of the achievement of BE-MSS within the context of the EQAS and in particular, related systems of school and madrasah accreditation, school self-evaluation, and school monitoring by districts, is an important priority.

6. Significant progress has been made, led by MoEC², in developing systems for 'rolling-out' BE-MSS, and in developing district and school level capacity for BE-MSS implementation. Guidelines and tools for BE-MSS analysis, incorporating BE-MSS in planning and budgeting, and systems for BE-MSS monitoring and reporting, have been developed. BE-MSS capacity building programs have been developed, cadres of trainers established, and socialisation and training delivered in many districts. During October and November 2011 a School Financial Management Training program is being implemented for all districts, and all schools and madrasahs, for around 645,000 officials. The training program incorporates BE-MSS in the context of planning and financial management, including use of the operational assistance to schools (*BOS*). Effective utilisation of *BOS* has the potential to optimise the achievement of BE-MSS related to school level processes and responsibilities.

7. In addition, in 2010, more comprehensive support was provided to five pilot

¹ This is also referred to as NSE+ and includes 'local excellence based' and 'international standard education units..

² Supported by the Basic Education Sector Capacity Support Program, 2008-10 (European Union – Asian Development Bank cooperation).

districts³ to develop and test BE-MSS planning processes, and a baseline survey of BE-MSS achievement, covering 5,218 schools and madrasahs (in 60 districts in 29 provinces) was undertaken in 2010. The baseline survey showed considerable incidence of low achievement of certain indicators suggesting the need for targeted efforts in terms of resourcing, capacity development and advocacy. Areas of low achievement include a deficit of classrooms, low levels of principal and teacher qualifications and certification, lack of educational materials including textbooks, low hours of instruction, ineffective utilisation of teachers, weak district supervision of schools, and limited implementation of school based management.

8. MoEC recognises the importance of reducing disparities in basic education performance and resourcing, and is currently identifying under-performing districts which are lagging behind, for targeted supplementary support. BE-MSS assessment provides a sound basis for identifying districts and schools/ madrasahs. It will be important that strategies for support focus on developing the capacity of districts and schools to plan and implement BE-MSS, and for more effective allocation and utilisation of resources. In addition, there is an opportunity to incorporate prioritisation and targeting of support to under-performing districts and schools/ madrasahs through central MoEC and MoRA programs (e.g. school and classroom rehabilitation programs), using BE-MSS analysis.

9. Significant BE-MSS socialization has been undertaken largely focused on Government officials at all levels, including school/madrasah principals and teachers. An important priority is to extend socialization to the public – primarily parents and community members – and other stakeholders, e.g. non-Government organisations and local parliamentarians, through development and implementation of BE-MSS advocacy programs. By focusing on the demand side, this will aim to strengthen transparency and accountability, and to empower the public in advocating for provision of BE-MSS in basic education.

10. The European Union is currently developing Phase II of their assistance to the Education Sector Support Program (ESSP)⁴ with Government. It is intended that Phase II will support the Government in fast-tracking of BE-MSS roll-out and achievement in targeted districts and schools through a combination of sector budget support, and support to capacity development and advocacy. Support is envisaged to commence in early/mid 2013. This support through the ACDP will be consistent with the Phase II design and will provide interim support from mid-2012 to early 2013.

III. Results

11. The purpose of the support to Basic Education Minimum Service Standards Planning and Monitoring is to strengthen and sustain capacity for management, implementation and monitoring of BE-MSS at all levels.

3 Gorontalo (North Sulawesi), Gresik (East Java), Lombok Tengah (NTB), Musi Banyuasin (South Sumatra) and Sleman (Jogjakarta).

4 (Jointly supported By AusAID).

12. The intended results are therefore more effective strategies, programs, financing and systems which contribute towards nationwide achievement of Basic Education Minimum Service Standards.

IV. Scope of Work

Technical Focus

13. ACDP will provide technical support to BE-MSS planning and monitoring. The specific timing and duration of the following activities will be agreed as part of inception planning, taking into account linkages and inter-dependencies. However, as a general principle the activities will be undertaken simultaneously to ensure progress and timely completion.

i. *Undertake Basic Education Minimum Service Standards Survey.* A nationwide BE-MSS sample survey, including cost analysis, will be undertaken using the same general methodology as the 2010 BE-MSS Baseline Survey, taking into account any necessary measures to improve implementation while enabling valid comparisons and analysis of progress. **Attachment 1** presents the Terms of Reference for the BE-MSS Survey to be conducted as a component activity of the Support to Basic Education BE-MSS Planning and Monitoring (this TOR).

ii. *Review Central Level Education Policies and Programs related to BE-MSS (under MOEC, MOHA and others).* This will include assessing the feasibility and developing recommendations for BE-MSS integration and targeting within existing MoEC and MoRA programs and fund channeling mechanisms, e.g. school and classroom rehabilitation programs, DAK fund channeling.

iii. *Review District Level Capacity for Planning and Monitoring Minimum Service Standards.*

This will include an evaluation of the BE-MSS five district pilot, and other selected districts, focusing on BE-MSS planning and budgeting processes and outcomes, BE-MSS monitoring and reporting, and BE-MSS community sensitisation/advocacy programs. A specific task will be to assess the feasibility of developing district and school/madrasah report cards focused on BE-MSS, taking into account existing and forthcoming initiatives. The evaluation will outline lessons learned, good practice, capacity limitations, and develop recommendations for strengthening systems. The results of the evaluation should also be used to inform BE-MSS capacity development strategy (point v below).

iv. *Develop clear linkages between Basic Education Minimum Service Standards and other Quality Assurance Systems.* Analyse and articulate the relationship between BE-MSS and the school/madrasah accreditation system (under the National Board for Accreditation of Schools and Madrasahs, BAN-SM) to facilitate clarity and consistency in how the two systems are aligned and interpreted for assessment purposes. Recommend measures to facilitate this and develop guidelines/tools as necessary. The analysis should use a sample of the BE-MSS Baseline Survey schools/madrasahs. In

addition, undertake similar analysis of the relationship between BE-MSS and NSE sample monitoring undertaken by the National Education Standards Agency (BSNP), and the School Self Evaluation system.

v. *Further Develop Basic Education Minimum Service Standards Capacity Development Strategy and Programs.* The initial task will be to evaluate BE-MSS capacity building and socialisation programs undertaken in 2010-12 including the School Financial Management Training Program. The results of this evaluation will be used to develop recommendations and strategies for nationwide BE-MSS capacity development 2013-15. A key aspect will be to explore integration of BE-MSS training/socialisation into related capacity development programs, including (but not restricted to) the nationwide continuous professional development program for school/madrasah principals and supervisors. An important area of focus will be to explore and develop options for encouraging BE-MSS compliance through incentives and possibly sanctions.

vi. *Develop and Design Systems for the Management of the Minimum Service Standards District Grants Program.* This will include the design of the following mechanisms/ tools: BE-MSS District Grants program manual and guidelines including audit requirements; district grant proposal guidelines/templates; central – district government memorandum of agreement; guidelines/templates for district BE-MSS status quo assessments, BE-MSS district road maps, and district BE-MSS progress assessments. In addition, if necessary, review district selection criteria and systems. This work will incorporate review of existing regulations on fund channeling mechanisms and their implementation, including lessons learned from ‘on-granting’ (Government Regulation in 2011) through BEC-TF.

vii. *Develop an Action Plan for Supporting Nationwide Achievement of Basic Education Minimum Service Standards.* This plan will incorporate and summarise all of the above elements and other aspects as appropriate, over a period to be agreed. The plan will include clear sequencing and responsibilities.

14. The work should take into account information and lessons learned from other programs that have been supporting initiatives related to BE-MSS (e.g. USAID-supported Decentralised Basic Education, AusAID Support for Education Sector Development, and LOGICA, in Aceh, and the World Bank BEC-TF funded by EU and the Netherlands).

15. The work should also take into account relevant international ‘good practice’ and lessons from other countries where appropriate.

Scope of Assistance and Timeframe

16. The consultancy will be implemented between mid-2012 to mid-2013 over a period of 9 months from mobilization to finalization of the outputs.

17. A team of consultants will undertake the work outlined above. The team will be comprised of the following personnel:

Team Members	Person Months
Team Leader Basic Education Policy Specialist (International)	8
Basic Education Planning & Capacity Development Expert (International)	4
Basic Education District Governance & Financing Expert (National)	8
Basic Education District & School Management Expert (National)	6
BE-MSS Survey Team Members (All National)	Person Months
Research Specialist/Survey Team Leader	7
Statistician	6
Data Analysts (2 x 3pm)	6
Senior Programmer	2
Total	47

18. Additional national Provincial Supervisors (\pm 33 persons x 3 months) and Field Supervisors (\pm 200 persons x 2 months) will be used to implement the BE-MSS Survey.

19. The outputs and the component reports will be developed through extensive document collection and review, consultations with relevant Government of Indonesia officials in Jakarta, and representatives of development partners and other stakeholders, as well as through comprehensive consultations during field visits and the field survey.

20. Field work will be undertaken as follows:

- Field visits to each of the five BE-MSS pilot districts, and other districts selected for evaluation;
- BE-MSS Survey (at least 5,280 schools/madrasahs from approximately 50 districts); and
- An additional three field visits to be identified for the purpose of gathering additional information and increasing understanding of key issues arising from ongoing analysis and development of the outputs.

21. Provision for selective MoEC and MoRA staff participation in field visits should be proposed for the purpose of facilitating ownership and building capacity. These aspects will be detailed in the field visit plan developed during inception phase and included in the Inception Report.

22. Specific consultations will also be held with other ACDP supported consultancy teams and information shared, as required, to ensure effective linkages and information sharing between related activities. In particular it will be important that the following teams are consulted: i) Free Basic Education Strategy Development; ii)

School and Madrasah Principals and Supervisors Competencies Baseline Survey; iii) Evaluation of Education Decentralisation Implementation; iv) Development of BE-MSS for Senior Secondary Education; v) Development of a District Report Card; and vi) Curriculum and Teaching/Learning Materials.

V. Deliverables Outputs

23. The schedule for the delivery of the outputs of the Support to Basic Education Minimum Service Standards Planning and Monitoring will be agreed with the BE-MSS technical working group (outlined in paragraph 24) through the processes of inception planning and ongoing progress meetings. The main outputs of the study will be presented by the team in draft form in meetings led by the BE-MSS working group and finalized based on inputs from the BE-MSS Working Group, the ACDP Co-Chairs, ACDP Partners and other key stakeholders. All reports will be prepared in both Bahasa Indonesia and English. The reports to be produced are as follows:

i. An **Inception Report** will be submitted presenting the approach and methodology to be implemented by the team, comments on the Terms of Reference, review of the current policies and tools on BE-MSS, the work plan of the team, and the schedule of activities. This report will be presented in a maximum 20 pages *within one month of mobilization of the team*.

ii. A **Report on the BE-MSS Survey** (see **Attachment 1**) will be presented *within four months from the date of the mobilization of the team*. This report will be prepared in accordance with the methodology and outline presented in **Attachment 1**.

iii. A **Mid-Term Report** will be submitted within five months from the date of mobilization of the team. The Mid-Term Report will present an overview of the progress of the team in implementation of the Terms of Reference. The Mid-Term Report will also present the following specific reports as annexes:

a. Review of District Level Capacity for Planning and Monitoring BE-MSS including evaluation of the BE-MSS Five District Pilot, and other selected districts.

b. Evaluation of BE-MSS Capacity Building Programs (including specific materials, guidelines, tools, etc.).

iv. A **Final Report** presenting an overview of the work completed, processes undertaken, results of all stages of the work completed, key issues and recommended follow-up, and a plan for dissemination and communication of outputs. In addition the specific reports listed below will be submitted. The draft Final Report will be submitted within eight months from the date of mobilization of the team, and presented in a multi-stakeholder forum lead by the BE-MSS working group. The Final Report will reflect the comments received in this forum and will be submitted within nine months. The Final Report will include annexes presenting the detailed findings and recommendations on the following topics:

a. BE-MSS Capacity Development Strategy 2013-15 (including implementation plan).

- b. Assessment Paper on Relationship between BE-MSS and other Education Quality Assurance tools including *BAN-SM*. Production of any guidelines/tools required to facilitate alignment of systems as required.
- c. Review of Central Level Education Policies and Programs related to BE-MSS including specific recommendations for BE-MSS integration and targeting in strategies/ programs/ fund channeling mechanisms.
- d. BE-MSS District Grants Program mechanisms and tools outlined in paragraph 13 vi.
- e. Action Plan for Supporting Nationwide Achievement of BE-MSS.

VI. Management and Reporting Arrangements

24. A Basic Education Minimum Service Standards Technical Working Group will be established by a DG of Basic Education decree to oversee progress of the consultancy. The technical working group will be chaired by the Secretary of the Directorate General for Basic Education and will meet monthly (or more often as required). Members of the BE-MSS Technical Working Group will include representatives from:

- Secretariat of the Directorate General of Islamic Education, MoRA
- Directorate for Education and Religion, BAPPENAS
- Directorate for Local Government Capacity Improvement and Performance
- Evaluation, MoHA
- Directorate for Directorate for Regional Budget, Directorate General for Regional
- Finance, MOHA.
- Center for Education Quality Assurance, Board of for Human Resource Development and Education Quality Assurance, MoEC
- Directorate of Primary Education, DG of Basic Education, MoEC
- Directorate of Junior Secondary Education, DG of Basic Education, MoEC
- Center for Policy Research, BALITBANG, MOEC
- Director for Madrasah Education, DG of Islamic Education, MoRA
- Board of National Education Standards
- National Board for Accreditation of Schools and Madrasahs
- Head of Law and Personnel Division, DG of Basic Education, as Secretary of the BE-MSS Technical Working Group

25. The Division of Law and Personnel, under the Secretary of the Directorate General for Basic Education is responsible for BE-MSS socialisation and monitoring. This division will facilitate the technical working group. In addition, the Secretary will designate a staff member from this division to assist with coordinating the work of the consultancy team. This will include providing guidance on persons to be met, locations for field visits, planning consultation workshops, assisting with accessing appropriate documentation and participating in field visits and technical

26. The consultancy team will report on progress to the technical working group as required. The ACDP Secretariat and advisory team will provide support to the working group.

27. The ACDP Program Manager/ACDP Secretariat will convene specific coordination meetings bringing together consultancy teams and/or technical departments/ agencies

from other ACDP supported activities for the purpose of monitoring progress, information sharing, review of draft reports and facilitating effective linkages between related activities.

28. Five hard copies of each of the draft and final output documents will be delivered to the primary user agency (Secretary of the Directorate General for Basic Education) and twenty to the ACDP Program Manager/ Secretariat, and also submitted by email. All draft and final reports and presentations will be submitted in Bahasa Indonesia and English.

29. The ACDP Program Manager in consultation with the BE-MSS Working Group and the technical group will be responsible for recommending approval of all outputs and reports. Progress payments based on delivery of outputs will be approved by ADB.

VII. Consultation, Socialization, Dissemination and Follow-up

30. As a minimum, the consultancy team will ensure consultations with the following Government institutions and development partners:

- Ministry of Education and Culture, relevant Directorate Generals, departments/centres;
- Bappenas, Directorate for Religion and Education;
- Ministry of Religious Affairs, Directorate for Islamic Education and Directorate for Madrasah Education;
- Ministry of Finance;
- Ministry of Home Affairs;
- Parliament members;
- National Board for Accreditation of Schools and Madrasahs;
- National Education Standards Agency; and
- Asian Development Bank, AusAID, European Union, World Bank and other international development partners.

31. According to need it may be appropriate to consult with other Government departments, e.g. the Coordinating Ministry of People's Welfare.

32. At regional levels the consultancy team will ensure comprehensive stakeholder consultations and focus group discussions with the following:

- Provincial and district education offices of both MoEC and MoRA
- Provincial and district planning agencies/Bappeda
- District Office for Regional Inventory of Revenue, Finance and Assets (Dinas Pencatatan Pendapatan, Keuangan and Aset Daerah = DPPKAD)
- The full range of different types of basic education service providers, including teachers and other personnel
- Parents and community members
- Local parliament members
- Other education related bodies/non-government organizations/civil society as appropriate

33. Following production of the various outputs specified above, technical meetings, focus group discussions and consultative workshops will be planned as appropriate, to review the outputs and to solicit comments to feed into revisions.

34. The BE-MSS technical working group, in consultation with the ACDP Program Manager/ Secretariat, will be responsible for agreeing circulation and further socialization/dissemination (which may be supported by ACDP). This may include dissemination through the ACDP and/or MoEC websites, inclusion in the ACDP journal, presentations at ACDP conferences/ seminars.

VIII. Required Consultancy Profile

35. The core team will have the following qualifications, skills and experience:

36. The **Team Leader, Basic Education Policy Specialist**, (International) will have the following qualifications, skills and experience:

- A Master's degree in education or related fields;
- At least 10 years experience in basic education policy, strategy, planning, financing, implementation, and monitoring and evaluation;
- Experience as a team leader in development consultancy assignments;
- Significant experience of basic education quality improvement and school based management;
- Experience of the Indonesia basic education system is desirable;
- Excellent report writing skills including completion of complex analytical documents and reports combining inputs from multiple sources;
- Fluency in English reading, communicating, and writing – knowledge of Bahasa Indonesia is a plus.

37. The **Basic Education Planning and Capacity Development Specialist**, (International)

will have the following qualifications, skills and experience:

- A Master's degree in education or related fields;
- At least 7 years experience in basic education strategy, planning, implementation, and monitoring and evaluation;
- Substantial experience of institutional development and capacity development in the areas of central and district education planning, school based management, monitoring and evaluation;
- Experience of the Indonesia basic education system is desirable;
- Excellent report writing skills;
- Fluency in English reading, communicating, and writing – knowledge of Bahasa Indonesia is a plus.

38. The **District Governance & Financing Specialist**, (National) will have the following qualifications, skills and experience:

- Master's degree in finance or related fields;
- At least 7 years experience Indonesian decentralisation, district governance, finance;
- Significant knowledge and experience of Indonesian public finance management systems and regulations, including fund channeling;
- Significant knowledge and experience in education financial planning, budgeting and management, at central, district and school levels;
- Significant experience in program implementation manuals and guidelines including for fund channeling and reporting.

39. The **Basic Education District and School Management Specialist**, (National) will have the following qualifications, skills and experience:

- Master's degree in education or related fields;
- At least 7 years experience in Indonesian basic education;
- Significant knowledge and experience of Indonesian basic education district management, and school based management systems
- Significant knowledge and experience of the Indonesian education quality assurance systems including National Education Standards and Minimum Service Standards ;

40. The specific personnel for the BE-MSS Survey will have the following qualifications, skills and experience:

41. The **Research Specialist/ Survey Team Leader** (National) will have the following qualifications, skills and experience:

- Masters degree in statistics or a related field with at least 7 years experience;
- At least five years experience in designing, planning and undertaking research including sample surveys, and participatory research, preferably related to education;
- The proposed consultant should have an experience as coordinator in at least two large scale survey assignments.
- Experience and knowledge of the Indonesia basic education system is desirable;
- Excellent skills in the analysis and presentation of quantitative research findings; and
- At least five years work experience in the implementation of field research funded by international development partners.

42. The **Statistician** (National) will have the following qualifications, skills and experience:

- Masters degree in quantitative methods, statistics or computer science ;
- At least five years experience in designing, planning and implementation of research including sample surveys, preferably related to education;
- Specific experience of using statistical software (SAS, SPSS, STATA);
- Experience and knowledge of the Indonesia basic education system is

desirable; and

- Excellent skills in the statistical analysis and presentation of research findings.

43. The **Senior Programmer** (National) will have the following qualifications, skills and experience:

- Masters degree in Quantitative Methods, Statistics or Computer Science;
- At least five years experience in programming for statistical analysis of survey results; and
- Experience and knowledge of the Indonesia basic education system is desirable

44. The **Data Analysts** (2 Nationals) will have the following qualifications, skills and experience:

- A minimum of a bachelors degree (S1) in statistics or a related area in quantitative analysis;
- At least five years experience related to analysis of Government of Indonesia data on education, nutrition, health, poverty and other social indicators; and
- Excellent skills in the analysis and presentation of statistics, including mapping of geographically referenced information.

45. The **Provincial Supervisors**⁵ (+/-33 Nationals) will have the following qualifications, skills and experience:

- A minimum of a bachelors degree (S1) in education or a related field of social science;
- At least three years experience in the implementation of field surveys on topics related to education and poverty;
- Excellent interpersonal skills in interviewing and surveying; and
- Extensive experience in the conduct of field surveys and the collection and tabulation of empirical data.

46. The **Field Surveyors**⁶ (+/-200 Nationals) will have the following qualifications, skills and experience:

- A minimum of a Diploma degree in education or a related field of social science;
- At least three years experience in the implementation of field surveys on topics related to education and poverty;
- Excellent interpersonal skills in interviewing and surveying; and
- Extensive experience in the conduct of field surveys and the collection and tabulation of empirical data.

⁵ Supported 5 The bidders are not required to submit candidates for the positions of Provincial Supervisors and Field Surveyor. The profiles for these two positions are presented here as a basis for estimation of costs for these positions and completion of the bidder's cost proposal for this work.

The team will be supported by an Office Manager, Secretary, and an Administrative Assistant (all must be based in Jakarta) during the duration of the study. The team will be based at an office to be equipped and maintained in Jakarta. List of the equipment to be purchase for support the work of the team are as follow: File Server 1 unit; Desktop Computers 9 unit; Notebook Computer 2 unit; Projector and screen 1 unit; Copier/Printer/Scanner 1 unit; Tel/Fax Machine 1 unit; Wireless Router and Adapters 1 package.

IX. Estimated Budget Requirement

47. USD **1,482,695**

LAMPIRAN 2

**DAFTAR INSTITUSI DAN INDIVIDU YANG DIKONSULTASIKAN
OLEH TIM ACDP 018**

Appendix 2. Daftar Institusi dan Individu yang Dikonsultasikan oleh Tim ACDP 018

No	Nama	Institusi
I. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	Dr. Thamrin Kasman	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
2	Dr. Ir. Bastari, MA	Kepala Pusat Penjaminan Mutu, BPSDMPK-PMP
3	Dr. Bambang Indriyanto	Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Kemdikbud
4	Dr. Didik Suhardi, SH, M.Si.	Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
5	Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed	Kepala BAN-SM
6	Prof. Dr. M. Aman Wirakartakusuma, M.Sc	Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan
7	Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA	Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setdijen Dikdas, Kemdikbud
8	Nono Adya S, MT	Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setdijen Dikdas, Kemdikbud
9	Nurma Dewi Saleh, M.Ed	Kasubag Kerjasama, Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setditjen Dikdas, Kemdikbud
10	Wulandoro Santoso, S.S, M.Si	Staf Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setditjen Dikdas, Kemdikbud
11	Dr. Subijanto, M.Ed	Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Balitbang
12	Syamsir Alam	Sekretaris BAN-SM
13	Dr. Khomsiyah	Tim Konsultan BSNP
14	Drs. Ramlan M.Pd	Kasubdit Program dan Evaluasi Dit. Pembinaan SD
15	Nurma Dewi Saleh, M.Ed	Kasubag Kerjasama, Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setdijen Dikdas, Kemdikbud
16	Srie Amien	Setdijen Dikdas, Kemdikbud
17	Aliyas	Kasubag Kepegawaian, Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setdijen Dikdas, Kemdikbud
18	M. Hartono	Kasubag Hukum dan Tatalaksana, Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setdijen Dikdas, Kemdikbud
19	Fathurahman	Kasi Pada Subdit Program Dit. Pembinaan SMP
20	Ariati Dano	Subdit Kelembagaan dan Peserta
21	Suyadi	Bagian Keuangan Setdijen Dikdas, Kemdikbud
22	Liberty Marpaung	Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setdijen Dikdas, Kemdikbud
23	Jazziray Hartoyo	Subag Kerjasama, Setdijen Dikdas, Kemdikbud
24	Sumiasih	Setdijen Dikdas, Kemdikbud
25	Diana Triastuti	MSS National Trainer
26	Esty Fahriati	MSS National Trainer
II. KEMENTERIAN AGAMA		
27	Cut Ummu	Pusdiklat, Kemenag
28	Waryadi	Pusdiklat, Kemenag

No	Nama	Institusi
29	Fachrudin	Kemenag Provinsi DIY
III. KEMENTERIAN KEUANGAN		
30	Drs. Herry Purnomo, M.SOS.Sc	Direktur Jenderal Anggaran
31	Dr. Marwanto Hatjowiryono, MA	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
IV. ASIAN DEVELOPMENT BANK		
32	Wolfgang Kubitzki	Asian Development Bank, Social Sector Specialist (Poverty)
33	Sutarum Wiryono	Asian Development Bank, Project Officer (Education)
34	Anggriani	Asian Development Bank
35	Linarti	Asian Development Bank
V. AusAID		
36	Brian Spicer	AusAID, Education Quality Team Leader
37	Karen Taylor	AusAID, International Education Advisor (Provincial & District Development)
38	Julia Wheeler	AusAID, Senior Program Manager
39	Jennifer Donohue	AusAID, Unit Manager, Education Quality & Governance
40	Nicholas John Lister Clinch	AusAID POM, Operations Manager
41	Laurent de Schoutheete	AusAID POM, Senior M&E Specialist
42	Jeffrey Fielden	AusAID POM, Senior Infrastructure Specialist
43	Mauliyati Nuraini Slamet	AusAID POM, Administrative Manager
44	Mochtar Helmi	AusAID POM, Finance and Procurement Manager
VI. EUROPEAN UNION (EU)		
45	Elisabeth Pirnay	European Union, Education Program Officer
46	Destriani Nugroho	European Union, Project Officer (Education)
VII. WORLD BANK (WB)		
47	Sheila Town	World Bank, Operation Officer Education
VIII. UNICEF		
48	Seema Agarwal	Unicef, Chief of Education

DAFTAR PESERTA FGD

NO.	NAMA	POSISI
	I. PROVINSI DI YOGYAKARTA	Tanggal: 26 April 2013
1	Abdul Hadi	Ka. MTs Negeri Yogyakarta I
2	Abdul Haris Nufika	Ka. Bid. Pddk Madrasah Kab Sleman
3	Mudal Wardono	Ka. SMP Nasional Bantul
4	M. Ikhwan A.	MTs Muallimin Muh. Yogyakarta
5	Sri Nurhadi	Ka. SD 2 Padokan Kasihan
6	Surachimin	Ka. SDN I Sleman
7	Jauzan Sanusi	Ka. Bid. Pddk Madrasah Kab. Bantul
8	Supangat	MTsN Piyungan
9	Sulistyo Wardono	SMP Muhammadiyah Bantul
10	Titi Sulistiani	LPMP DIY
11	Hj. Nurhayati	SD I Bantul
12	Harjana	SMPN I Bantul
13	Sri Widayati	Ka. Bid. PLB & Disdik, Disdikpora DIY
14	Noor Hamid	Ka. Bid. Pddk Madrasah, Kanwil Kemenag DIY
15	Subijati	Dinas Pendidikan Dasar Bantul
16	Wahyuni K	Ka. Sekolah SMPN I Sleman
17	Sofyan Setyo D	Komisi D DPRD Sleman
18	Suyono	DPPKAD Bantul
19	Pranomo	Ka. Bid. Sosbud BAPPEDA Sleman
20	Indah Sri Indraswari	BAPPEDA Bantul
21	Suparno	Kasi TK – SD Disdikpora DIY
22	Bambang Irianto	Kasi SMP Disdikpora DIY
23	Sukarja	Dinas Pendidikan Bantul
24	Sungkana	
25	K. Baskara Aji	Dikpora
26	Achmad Fauzi	Kanwil Kemenag DIY
27	EN. Nenggono	Dinas Dikpora DIY
28	Supriyono	Dinas Dikpora
29	Lilis Susilawati	Dinas Dikpora
30	Yustina Suciati	Dinas Dikpora
31	Jayadi	Dinas Dikpora
	II. PROVINSI JAWA TIMUR	Tanggal: 1 Mei 2013
32	Drs. H. Moh. Amin	Ka.. MTs. NU Trate Gresik
33	Masfufah, M.Pd	Ka. Mts N Gresik
34	Abdur Rozaq S.Ag, MM	Ka. MINU Trate Putri Gresik
35	Isa Iskandar	Ka. SMP M 12 GKB Gresik

NO.	NAMA	POSISI
36	M. Fauzi, S.Pd.I	Ka. MI Hidayatun Tuban
37	Mirdjulhuda	Ka. Kantor Kemenag Kab. Tuban
38	Ghonimah	Ka. MTs N Tuban
39	Drs. Abdul Halim, M.Ag	Kasi Kurikulum dan Evaluasi Kanwil Kemenag Prov. Jatim
40	Haris Hamdi	Kemenag Gresik
41	Dra. Hj. Nuryun, M. Pd	SDN Klanganan Gresik
42	Yudo Siswanto	Ka. SMP N 3 Gresik
43	Rohmad	DPPKAD Tuban
44	C. Fazy	Ka. SMPN 3 Gresik
45	Sutarno	Disdikpora Tuban
46	Fauzan	Ka. SMPN 2 Tuban
47	Ana Muhibbudin	BAPPEDA Tuban
48	Kasmulik	SDN Lastari Tuban
49	Sumardi	Dispendik Gresik
50	Ahmad Jazuli	SDNU 1 Trate Gresik
51	Hamsiyah	SDN 2 Sidokumpul Gresik
52	Sunanto	Dinas Pendidikan
53	W. Kurniastuti	BAPPEDA Gresik
54	Nakhtim	Kasie Perencanaan Diknas Pendidikan Jatim
55	Yazid	DPPKA Gresik
56	Anis Hurul A	DPPKA Gresik
57	Drs. Ali Afandi M.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Gresik
58	Chumaidi	DPRD Gresik
59	Rudi Ridiansyah	Seksi Sungram Dinas Pddk. Prov Jatim
60	Heryani	Dinas Pendidikan Prov. Jatim
61	Sri Angesti P. Dyah	Dinas Pendidikan Prov. Jatim
62	Rima Citrafianti	Dinas Pendidikan Prov. Jatim
63	Sugeng Hariadi	Dewan Pendidikan Tuban
III. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		Tanggal: 26 April 2013
64	Drs. H. Imhal	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTB
65	Nasarudin	Komisi Pendidikan DPRD Provinsi NTB
66	Anggraini N	LPMP NTB
67	H. Jalalusayuti	Kabid Mapenda Kanwil Kemenag
68	Suardi	Staf Dinas Pendidikan Prov. NTB
69	Syaiful Anri	Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah
70	Komarudin	Ka. Dinas Pendidikan Kab. Lombok Barat
71	H. Jidan Hadi	Komisi Pendidikan DPRD Kab. Lombok Tengah
72	Anusapati	Kabid Sosial Budaya Bappeda Kab. Lombok Tengah
73	Fathurrahman	Kabid Social Budaya Bappeda Kab. Lombok Barat

NO.	NAMA	POSISI
74	Baiq Aluh Windahyu	Pejabat BPKAD Kab Lombok Tengah
75	Irma Eva Novianti	Pejabat BPKAD Kab. Lombok Barat
76	H. Maharuddin	Kabid Mapenda Kantor Kemenag Kab. Lombok Tengah
77	Hadi Hasan Zulkifli	Kabid Mapenda Kantor Kemenag Kab. Lombok Barat
78	H. Sumun, SPd, SH, MPd	Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah
79	Erwin Rachman ,ST	Dinas Pendidikan Kab. Lombok Barat
80	Khaeril Anwar	Dewan Pendidikan Kab. Lombok Tengah
81	H. Negara	Ka. SDN 4 Praya, Lombok Tengah
82	Marjana S.Pd	Ka. SDN 1 Gerung Utara, Lombok Barat
83	Sa'l, S.Pd	SMPN 1 Praya, Lombok Tengah
84	H. Muzapir, S.Pd, M.Pd	Ka. SDN Kab. Lombok Barat
85	B Suryani, S.Pdl	Ka. MI Nurul Iman, Lombok Barat
86	Kemas Bahar, M.Pd	Ka. MTs, Lombok Tengah
87	Nariadi, S.Pd	Ka. MTs D.I. Putra Kediri, Lombok Barat
88	B.Risa Fitriani	Staf Dinas Pendidikan Prov. NTB
89	Aditya Firdaus	Staf Dinas Pendidikan Prov. NTB
90	Dedy	Staf Dinas Pendidikan Prov. NTB
91	Sri Nugroho	Staf Dinas Pendidikan Prov. NTB
92	Harsono	Subag PRP Disdikpora, Lombok Tengah
93	Ahmad Mujahidin	Ka. MIN Leneng
94	Hj. Sutiningsih S.Pd	Ka. SMPN I Praya
95	Sudirman S.Pd	Guru SMPN I Praya
96	Supiatun, MA	MIDI Nurul Hakim Kediri
IV. PROVINSI SUMATERA SELATAN		Tanggal: 1 Mei 2013
97	Dr. Nurlina, MM	Ka. Bidang Bina Program, Dinas Pddk Sumsel
98	Dr. M. Zawawi	Staf Bidang Bina Program, Dinas Pddk Sumsel
99	Darmawi Setiawan	Staf Bidang Bina Program, Dinas Pddk Sumsel
100	Boediono	Staf Bidang Bina Program, Dinas Pddk Sumsel
101	Maulina S.Pd, MM	Ka. Sekolah SDN 179, Kota Palembang
102	M. Mardan Abdie	LPMP Prov Sumsel
103	Ahmad Fauzie	Kabid Mapenda Kanwil Kemenag Prov Sumsel
104	Badrun Saad	Dinas Pendidikan Kota Palembang
105	H. Fauzi Asran	Kabid. Perencanaan Dinas Pddk Musi Banyuasin
106	H. Azhari Ahmad	Komisi Pendidikan DPRD Kab. Musi Banyuasin
107	Drs. Indrianto	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kota Palembang
108	Kaulani W	Bid Sosbud BAPPEDA Kab. Musi Banyuasin
109	Suwinok Utama, SE, MM	Pejabat BPKAD Kota Palembang
110	Mursalim	Pejabat BPKAD Kab. Musi Banyuasin

NO.	NAMA	POSISI
111	Dra. Rusmalatika	Kabid Mapenda Kantor Kemenag Musi Banyuasin
112	Dra. Hj. Endah Kesuma Dewi, MT	Kabid Perencanaan Dinas Pddk Kota Palembang
113	Suryani, ST	Staf Bid Perencanaan Dinas Pddk Musi Banyuasin
114	Taufik, SH	Dewan Pendidikan Kab. Musi Banyuasin
115	Laili Fitriana, SPd, MM	Ka. SDN Kota Palembang
116	Uma'ani, M.Pd	Ka. SMPN Kota Palembang
117	Drs. Mujahidin, MM	Ka. SMPN Kab. Musi Banyuasin
118	Wahyu Winarto	Ka. SMP Swasta Kota Palembang
119	Anton Bagio, MM	Ka. MTs Kota Palembang
120	Dra. Mardianah	Ka. MTsN Lumpatan, Sekayu, Musi Banyuasin
121	Hj. Fadilawati, S.Pd	MI. AN-Nuur Kota Palembang
122	Muhammad Ilah	SMP UB Kota Palembang
123	Dra. Widiarti, M.Pd	SMP N 8 Sekayu
124	Drs. Kusdinawan	Staf Dinas Pddk Prov. Sumsel
125	Khairul Sholeh	Staf Dinas Pddk Prov. Sumsel
126	M. Basori	Staf Dinas Pddk Prov. Sumsel
127	N. Widiyarto	Staf Dinas Pddk Prov. Sumsel
V. PROVINSI GORONTALO		Tanggal: 10 Mei 2013
128	Dr. Sumarwoto, M.Sc	Waka Dinas Prov. Gorontalo
129	Syarifuddin Mobiliu	Komisi Pendidikan Prov. Gorontalo
130	Luizah Saidi	Ka. LPMP Prov. Gorontalo
131	H. Hamka Arbie	Kabid Mapenda Kanwil Kemenag
132	Rudi Daenunu	Kabid Dikdas, Dinas Pddk Prov. Gorontalo
133	Yanson	Waka Dinas Pddk Kota Gorontalo
134	Moh. Yasin Alitu	Waka Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo
135	Vian Djafar	Kabid Sosial Budaya Bappeda Kab. Gorontalo
136	Rahmawati Noer	Kabid Sosial Budaya Kota Gorontalo
137	Multi Ahmad	Kasie SMK, Dinas Pddk Kota Gorontalo
138	Mathias Tangulu, SE	Pejabat BPKAD Kab. Gorontalo
139	Drs. H. Burhan P	Bid Mapenda Kantor Kemenag Kota Gorontalo
140	Nursila R. Solong, SSi	Bid Mapenda Kantor Kemenag Kab. Gorontalo
141	Rais Happy	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
142	Fristo Kau, MPd	Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo
143	Sarson P	Dewan Pendidikan Kota Gorontalo
144	Zeuramang Nuko	SDN Kota Gorontalo
145	Abdul Muis Anara, S.Pd	SDN Kab. Gorontalo
146	Wanda Andu, S.Pd	Ka. SDS MAESA Kota Gorontalo
147	Darsoeb Daud, M.Pd	Ka. SMPN Kota Gorontalo
148	Aziz Noho Kasim	Ka. SMPN 4 Telaga Kab. Gorontalo
149	Latif Littie	Ka. SMP Swasta Kota Gorontalo

NO.	NAMA	POSISI
150	Rahman B. Junus	Ka. MIS Alwathaniah Kota Gorontalo
151	Hasmi A. Monu	Ka. MTs Negeri/Swasta Kota Gorontalo
152	Maziatussaraf H. Kau, M.Pd	Ka. MTs Negeri/Swasta Kab. Gorontalo
153	Rahman B. Junus	MI AL Wathaniyah Kota Gorontalo
154	Wanda Andu, S.Pd	SD Kristen MAESA
155	Winarni A. Duda, S.Pd	Dinas Pendidikan Prov. Gorontalo
156	Endang Zain	Dinas Pendidikan Prov. Gorontalo
157	Husin Karim	Dinas Pendidikan Prov. Gorontalo
158	Sandra Apita	Dinas Pendidikan Prov. Gorontalo
159	Suhadirman Amir	Dinas Pendidikan Prov. Gorontalo
160	Moh. Karno	Dinas Pendidikan Prov. Gorontalo